BAGIAN ANGGARAN 005.05
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

SEMESTER I TAHUN 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.05

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

DIRJEN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEMESTER I

TAHUN ANGGARAN 2022

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov
Telp. 07179111513
Pangkalpinang - Bangka Belitung 33148
e-mail : pangkalpinang@ptun.org

Kata Pengantar

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian *(controlling)* atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan *(disposal)*.

DAFTAR ISI

		Hal.
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii
I.	Pendahuluan	1
II.	Dasar Hukum	4
III.	Kebijakan Akuntansi BMN	6
	3.1 Aset Tetap	7
	3.1.1. Tanah	7
	3.1.2. Gedung dan Bangunan	7
	3.1.3. Peralatan dan Mesin	8
	3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
	3.1.5. Aset Tetap Lainnya	8
	3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	9
	3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
	3.2 Persediaan	10
IV.	Laporan BMN	11
	4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
	4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
	4.2.1. Aset Tetap	15
	4.2.2. Konstruksi Dalam Pengerjaan	16
	4.2.3.Pesediaan	16
	4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	16
V.	Kendala dan Saran	18

5.1. Kendala 18

5.2. Saran 18

VI. Penutup 19

Lampiran

A. Catatan Ringkas Barang Milik Negara

B. Laporan Barang Intrakomptabel

C. Laporan Barang Ekstrakomptabel

D. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel

E. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan

F. Laporan Aset Tak Berwujud

G. Laporan Barang Bersejarah

H. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan

I. Laporan Penyusutan BMN

J. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca

K. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester I Tahun 2022 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

Pangkalpinang, 30 Juni 2022

Kuasa Pengguna Barang

Romatua Lasma Sembiring, SH
NIP. 197110121992032001

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dai APBN tertapi sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
   a. Perusahaan Perseroan, dan
   b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN dalam SAPP

Dalam Sistem Akuntasi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan, BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangkan pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Dapat diperbandingkan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi semua diinventarisir dan dilaporkan melalui MODUL ASET TETAP.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.

13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3. Aset Tetap

A. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. Aset Barang Bersejarah (Heritage Assets)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;

b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;

c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;

d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. Proses Penyusunan Laporan

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dengan menggunakan SAKTI MODUL ASET TETAP tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang).

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian Modul Aset Tetap dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara melihat aplikasi MONSAKTI tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi intenal tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan SAKTI, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementrian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. Laporan Barang Milik Negara

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2022 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Neraca Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebesar Rp. 2.618.575 dengan rincian sebagai berikut:

NAMA ASET	*NILAI RUPIAH*
Persediaan	2.618.575
Tanah	0
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan PeralatandanMesin	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
Aset tak Berwujud	0
AkumulasiPenyusutan Software	0
Aset Lainnya	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	0
Total	2.618.575

Berikut table dan grafik perubahan nilai BMN Semester II 2021 dengan Semester I 2022.

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

SEMESTER II TAHUN 2021 DAN SEMESTER I TAHUN 2022

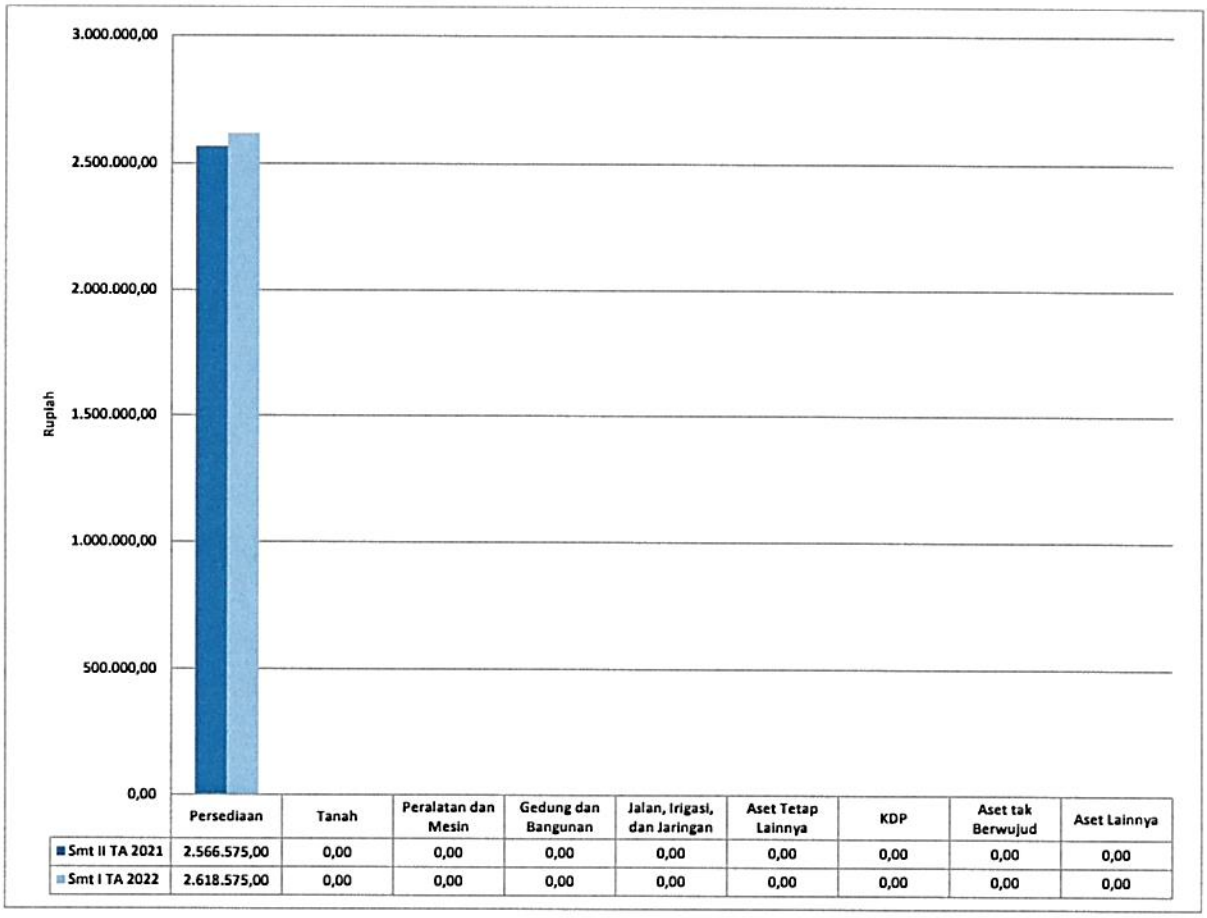
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)

NAMA ASET	*SEMESTER II TA_2021*	*SEMESTER I TA_2022*
Persediaan	2.566.575	**2.618.575**
Tanah	**0**	**0**
Peralatan dan Mesin	**0**	**0**
Gedung dan Bangunan	**0**	**0**
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	**0**	**0**
Aset Tetap Lainnya	**0**	**0**
Konstruksi dalam Pengerjaan	**0**	**0**
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	**0**	**0**
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	**0**	**0**
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	**0**	**0**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	**0**	**0**
Aset tak Berwujud	**0**	**0**
AkumulasiPenyusutan Software	**0**	**0**
Aset Lainnya	**0**	**0**
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	**0**	**0**
Total	**2.566.575**	**2.618.575**

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

SEMESTER II TAHUN 2021 DAN SEMESTER I TAHUN 2022

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Aset tak Berwujud	Aset Lainnya
Smt II TA 2021	2.566.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smt I TA 2022	2.618.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1. Aset Tetap

a. Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2022 tidak mengalami peningkatan;
b. Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2021 tidak mengalami kenaikan.

4.2.2 Kontruksi Dalam Pengerjaan

Tidak ada Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2022.

4.2.3. Persediaan

Nilai Persediaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2022 mengalami perubahan nilai yang disebabkan pembelian dan pemakaian barang persediaan.

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG SEMESTER II TAHUN 2021 DAN SEMESTER I TAHUN 2022

PERSEDIAAN	SEMESTER II TA 2021	SEMESTER I TA 2022
Barang Konsumsi	**873.400**	**925.400**
Bahan Untuk Pemeliharaan	**1.693.175**	**1.693.175**

4.3 Posisi BMN di Neraca

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2022 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2022.

TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

SEMESTER I TAHUN 2022

NAMA ASET	*UAKPA*	*UAKPB*
Persediaan	2.618.575	2.618.575
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
AkumulasiPenyusutan Software	0	0
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	2.618.575	2.618.575

V. Kendala dan Saran

5.1. Kendala

Tidak ada kendala

5.2. Saran

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2022 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementrian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga dapat mempertahankan predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementeriam Negara/Lembaga dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya di bidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.

LAMPIRAN I
CATATAN RINGKAS
BARANG MILIK NEGARA

MAHKAMAH AGUNG

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA N

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA SEMESTERAN

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER BIDANG

POSISI SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA UAKPB : 005.05.3000 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Tanggal : 21/07/2022 17.48.20

Halaman : 1 dari 1

Kode Lap : LBCSGBT

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL								

Pangkalpinang, 29 June 2022

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris

Romatua Lasma Sembiring, S.H.

NIP 197110121992032001

LAMPIRAN II
LAPORAN BMN
INTRAKOMPTABEL

MAHKAMAH AGUNG

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA N

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN

INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK

POSISI SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2022

Tanggal : 21/07/2022

Halaman : 1 dari 1

Kode Lap : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 005.05.3000.403429 - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL										

Pangkalpinang, 30 Juni 2022

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris

Romatua Lasma Sembiring, S.H.

NIP 197110121992032001

LAMPIRAN III
LAPORAN BMN
EKSTRAKOMPTABEL

MAHKAMAH AGUNG

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA N

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN

EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK

POSISI SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2022

Tanggal : 21/07/2022

Halaman : 1 dari 1

Kode Lap : LBSESSKT

NAMA UAKPB : 005.05.3000.403429 - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL										

Pangkalpinang, 30 Juni 2022

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris

Romatua Lasma Sembiring, S.H.

NIP 197110121992032001

LAMPIRAN IV
LAPORAN BMN
GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN
EKSTRAKOMPTABEL

MAHKAMAH AGUNG

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA N

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE

RINCIAN PERS KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2022

SEMESTER 1

Tanggal : 21/07/2022 17.58.42

Halaman : 1 dari 1

Kode Lap : DTBSGSSKT

NAMA UAKPB : 005.05.3000.403429.000 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

JENIS TRANSAKSI : null null

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL								

Pangkalpinang, 30 Juni 2022

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris

Romatua Lasma Sembiring, S.H.

NIP 197110121992032001

LAMPIRAN V
LAPORAN ASET TAK BERWUJUD

MAHKAMAH AGUNG

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA N

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN

ASET TAK BERWUJUD

RINCIAN PER KELOMPOK

POSISI SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2022

Tanggal : 21/07/2022

Halaman : 1 dari 1

Kode Lap : LBSTSSKT

NAMA UAKPB : 005.05.3000.403429 - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL										

Pangkalpinang, 30 Juni 2022

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris

Romatua Lasma Sembiring, S.H.

NIP 19711012121992032001

LAMPIRAN VI
LAPORAN KONSTRUKSI
DALAM PENGERJAAN

MAHKAMAH AGUNG

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA N

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

RINCIAN PER KELOMPOK

null

TAHUN ANGGARAN 2022

Tanggal : 21/07/2022

Halaman : 1 dari 1

Kode Lap : LBSKSSKS

NAMA UAKPB : 005.05.3000.403429 - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		JUMLAH SD	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KDP YG MENJADI ASET DEFNITIF	JUMLAH SD
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

Pangkalpinang, 30 Juni 2022

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris

Romatua Lasma Sembiring, S.H.

NIP 197110121992032001

LAMPIRAN VII
LAPORAN BARANG BERSEJARAH

MAHKAMAH AGUNG

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA N

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN - SEMESTERAN

BARANG BERSEJARAH

RINCIAN PER KELOMPOK

POSISI SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2022

Tanggal : 21/07/2022

Halaman : 1 dari 1

Kode Lap : LBSSSSKT

NAMA UAKPB : 005.05.3000.403429 - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITA	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL										

Pangkalpinang, 30 Juni 2022

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris

Romatua Lasma Sembiring, S.H.

NIP 197110121992032001

LAMPIRAN VIII
BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov Telp / Fax. (0717) 9111513
Pangkalpinang - Bangka 33684
Email : pangkalpinang@ptun.org Website : www.ptun-pangkalpinang.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
SATUAN KERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG (403429)
SEMESTER I TAHUN 2021
NOMOR : W1.TUN10/ 509a /KU.00/06/2021

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-06-2022), bertempat di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang , Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Fanny Ruspanji, S.E.I.**
NIP : **19900412 202012 1 009**
Jabatan : Petugas UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama : **Rosalina, S.E.**
NIP : 199208082019032017
Jabatan : Petugas UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (KP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementrian Negara/ Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode 30 Juni Tahun Anggaran 2022, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Semester I Tahun Anggaran 2022		
		Saldo Awal per 01 Januari 2022	Mutasi	Saldo Akhir per 30 Juni 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
A	**ASET LANCAR**	**2.566.575**	**52.000**	**2.618.575**
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
2	Persediaan	2.566.575	52.000	2.618.575
B.	**ASET TETAP**	**0**	**0**	**0**
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
C.	**ASET LAINNYA**	**0**	**0**	**0**
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-Lain	0	0	0
D	**SUB JUMLAH (A+B+C)**	**2.566.575**	**52.000**	**2.618.575**
E	**EKSTRAKOMPTABEL**	**0**	**0**	**0**
F	**TOTAL (D+E)**	**2.566.575**	**52.000**	**2.618.575**

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKK/L disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode 30 Juni Tahun Anggaran 2022, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Modul Aset Tetap

Fanny Ruspanji, S.E.I.
NIP. 19900412 202012 1 009

Operator GLP

Rosalina, S.E.
NIP. 19920808 201903 2 017

Mengetahui
Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Romatua Lasma Sembiring, SH
NIP. 197110121992032001

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
keuangan	barang

II. PERIODE
06 / 22

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode: 005 - 05 - 3000 - 403429 - 000 - KD
2. Nama: Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
   Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung,

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN

NO	PERKIRAAN NERACA	SAK	SIMAK-BMN	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	**ASET LANCAR**	2.566.575	2.566.575	**2.566.575**
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
2	Persediaan	2.566.575	2.566.575	2.566.575
B	**ASET TETAP**	**0**	**0**	**0**
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	(Akumulasi Penyusutan)	0	0	0
C	**ASET LAINNYA**	**0**	**0**	**0**
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0
D	**SUB JUMLAH (A+B+C)**	**2.566.575**	**2.566.575**	**2.566.575**
E	**EKSTRAKOMPTABEL**	**0**	**0**	**0**
F	**TOTAL (D + E)**	**2.566.575**	**2.566.575**	**2.566.575**

V. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
A	**ASET LANCAR**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0
2	Persediaan	0	0	0	0
B	**ASET TETAP**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
3	(Akumulasi Penyusutan)	0	0	0	0
C.	**ASET LAINNYA**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0	0
D	**SUB JUMLAH (A+B+C)**	**0**	**0**	**0**	**0**
E	**EKSTRAKOMPTABEL**	**0**	**0**	**0**	**0**
F	**TOTAL (D+E)**	**0**	**0**	**0**	**0**

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
keuangan	barang

II. PERIODE
06 / 22

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode: 005 - 05 - 3000 - 403429 - 000 - KD
2. Nama: Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
   Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung,

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL			TOTAL
			Belanja Barang	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	**ASET LANCAR**	**0**	**0**	0	0	**2.566.575**
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0	0
2	Persediaan	0	2.566.575	0	0	2.566.575
B.	**ASET TETAP**	**0**	0	0	0	**0**
1	Tanah	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0
C	**ASET LAINNYA**	**0**	0	0	0	**0**
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0	0	0
D	**SUB JUMLAH (A+B+C)**	**0**	0	0	0	**0**
E	**EKSTRAKOMPTABEL**	**0**	0	0	0	0
F	**TOTAL (D+E)**	0	2.566.575	0	0	**2.566.575**

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode semester ITahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,-

IX. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada Pengungkapan lain-lain yang perlu dijelaskan dalam Rekonsiliasi Data BMN ini.

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
barang	keuangan

II. PERIODE
06 22

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode: 005 05 3000 403429 000 KD
2. Nama: Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
   Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung,

IV. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Tot. Rupiah SPPA	Selisih
NIHIL							

V. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUK BMN

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Tot. Rupiah SPPA	Selisih
NIHIL							

VI. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM MEMBENTUK BMN

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Keterangan
NIHIL						

LAMPIRAN IX
LAPORAN POSISI BMN DAN KEUANGAN PADA NERACA

UAPB : MAHKAMAH AGUNG

UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA N

UAPPB-W : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KODE UAKPB : 005.05.3000.403429.000.KD

KODE	URAIAN	NILAI
117111	Barang Konsumsi	925,400
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,693,175
	Jumlah	2,618,575

Disetujui tanggal : 30-06-2022
Kuasa Pengguna Barang

Romatua Lasma Sembiring, S.H.
NIP 197110121992032001

Pangkalpinang, 30-06-2022
Petugas Pengelola Persediaan

Fanny Ruspanji, S.E.I.
NIP 199004122020121009

LAMPIRAN X
LAPORAN PENYUSUTAN BMN

MAHKAMAH AGUNG

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA N

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

LAPORAN PENYUSUTAN

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK

SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA UAKPB : 005.05.3000.403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 30 JUNI 2022			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

Pangkalpinang, 30 Juni 2022

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris

Romatua Lasma Sembiring, S.H.

NIP 197110121992032001

LAMPIRAN XI
LAPORAN PERSEDIAAN DAN BA OPNAME FISIK

UAPB : MAHKAMAH AGUNG

UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA N

UAPPB-W : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KODE UAKPB : 005.05.3000.403429

KODE	URAIAN	NILAI PER 30-06-2022
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	0
000001	Spidol Snowman	0
000003	Pena	0
000008	pena	0
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	0
000001	Tinta Suntik	0
1010301003	Penjepit Kertas	0
000002	Binder Klip	0
000003	Binder Clip	0
1010301004	Penghapus/Korektor	0
000002	tipe x	0
1010301005	Buku Tulis	873,400
000002	Buku Agenda Sidang Hakim PTUN	198,550
000004	Buku Himpunan Perundang-Undangan	674,850
1010301006	Ordner Dan Map	0
000002	Box Files	0
000006	Map Snell	0
1010301010	Alat Perekat	0
000003	lakban hitam	0
000004	Lakban Bening	0
1010301012	Staples	0
000001	staples	0
1010301013	Isi Staples	0
000001	Isi Steples No. 10	0
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	0
000001	Gunting	0
1010302001	Kertas HVS	52,000
000001	Kertas HVS F4	0
000002	Kertas HVS A4	52,000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	0
000001	Catridge Hitam	0
000002	Catridge Warna 811	0
1010306010	Batu Baterai	0
000002	Baterai AA	0
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	0
000002	Alat Pengharum Ruangan	0
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0
000003	Tissue	0
000005	Gula	0
000006	Kantong plastik	0
	Jumlah per Akun	925,400

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KODE UAKPB : 005.05.3000.403429

KODE	URAIAN	NILAI PER 30-06-2022
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	0
000001	Pembersih Kaca	0
000002	Pembersih lantai	0
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	1,693,175
000002	Tanda lambang jabatan hakim dan panitera	567,600
000003	Bendera Merah Putih	399,575
000004	Bendera Pengadilan	726,000
	Jumlah per Akun	1,693,175
	Total Jumlah	2,618,575

Keterangan

1. Persediaan senilai 0 ,- dalam kondisi rusak
2. Persediaan senilai 0 ,- dalam kondisi usang

Disetujui tanggal : 30-06-2022
Kuasa Pengguna Barang

Romatua Lasma Sembiring, S.H.
NIP 197110121992032001

Pangkalpinang, 30-06-2022
Petugas Pengelola Persediaan

Fanny Ruspanji, S.E.I.
NIP 199004122020121009

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan
Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung 33148
Telp / Fax. (0717) 9111513
Email : pangkalpinang@ptun.org
Website : ptun-pangkalpinang.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN
(OPNAME FISIK)
Nomor : W1.TUN 10/ 505a /KU.01/06/2022

Nama Satker	: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.
Kode Satker	: 403429
UAPPB-W	: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.
UAPPB-E1	: DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini Tim opname fisik :

1. Nama : Muhammad Agus, S.E., M.Si. (Kasubbag Umum dan Keuangan)
   NIP : 198502072006041001
   Jabatan : Ketua

1. Nama : Rosalina.SE. (Staf Umum dan Keuangan).
   NIP : 199208082019032017.
   Jabatan : Sekretaris.

3. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I. (Staf Pengelola Persediaan).
   NIP : 199004122020121009
   Jabatan : Anggota.

Menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan fisik barang persediaan (Opname Fisik) Semester I Tahun 2022 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Persediaan (Stock Opname) ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Alamat : Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan
Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung 33148
Telp / Fax. (0717) 9111513
Email : pangkalpinang@ptun.org
Website : www.ptun-pangkalpinang.go.id

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Kode Satker : 005013000403429000KD
UAPPB-W : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
UAPPB-E1 : Dirjen Badilmiltun

No.	Nama Barang	Kode Barang	Kuantitas Barang		Selisih	Kondisi	
			Menurut Lap. Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang
1	Buku Agenda Sidang Hakim PTUN	1010301005-000002	1	1	0	v	-
2	Buku Himpunan Perundang-Undangan	1010301005-000004	3	3	0	v	-
3	Kertas HVS A4	1010302001-000002	1	1	0	v	-
4	Tanda Lambang Jabatan Hakim dan Panitera	1010305999-000002	6	6	0	v	-
4	Bendera merah putih	1010305999-000003	1	1	0	v	-
4	Bendera pengadilan	1010305999-000004	1	1	0	v	-

Tim Pelaksana Stock Opname :
1. Muhammad Agus, S.E., M.Si. : .....
2. Rosalina, S.E. : .....
3. Fanny Ruspanji, S.E.I. : .....

Pangkalpinang, 30 Juni 2022
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang

Romatua Lasma Sembiring, S.H.
NIP. 19711012 199203 2 001

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik) :

1. Nama : Muhammad Agus.SE.MSi. .....

2. Nama : Rosalina,SE. .....

3. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I. .....

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Romatua Lasma Sembiring,SH
NIP. 197110121992032001